

## Konflik Antaraktor Dalam Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik

Nur Farichah

Email : [chachanurfah@gmail.com](mailto:chachanurfah@gmail.com)

### ABSTRAK

Pembebasan lahan tidak terlepas dari konflik. Konflik terjadi karena masing-masing aktor mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda, saling bersinggungan, berkontestasi dan berkolaborasi untuk mendapatkan kepentingannya. Kolaborasi dilakukan oleh para aktor elite untuk memudahkan mendapatkan kepentingannya. Mereka disatukan dalam relasi kepentingan. Representasi kepentingan dilakukan oleh para elite untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kerugian. Konflik pembebasan lahan muncul akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh sekelompok aktor dengan segala cara untuk mendapatkannya, sehingga menimbulkan berbagai aksi pertentangan dari masyarakat. Penelitian ini mengungkap penyebab konflik yang terjadi di balik pembebasan lahan, transformasi yang terjadi selama proses eskalasi, dan yang dikonflikkan dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik. Hasil penelitian ini menemukan berbagai indikasi ketidak beresan dan pelanggaran yang diorientasikan pada praktik-praktik perburuan rente para aktor pembebasan lahan. Mereka dengan kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki mengupayakan segala cara untuk mengoptimalkan kepentingan, tanpa memperdulikan hak dan kepentingan masyarakat.

*Kata kunci: Konflik, Kepentingan, Elite, Negara, Masyarakat*

### ABSTRACT

Land acquisition is not detached from the conflict. Conflict occurs because each actor has different interests and aspirations, intersect, berkontestasi and collaborate to gain importance. Collaboration is done by the actors to facilitate getting elite interests. They are united in a relation of interest. Representation of interests is done by elites to maximize profits and minimize losses. Conflicts arise due to land acquisition for the injustice committed by a group of actors in every way to get it, giving rise to various actions of public opposition. The research reveals the causes behind the conflict in land acquisition, the transformation that occurs during the process of escalation, and that dikonflikkan in land acquisition development of international port of Gresik. The results of the survey found indications of irregularities and violations of practices oriented to rent seeking actors land acquisition. Those with power and resources owned by seeking every means to optimize the benefit, regardless of the rights and interests of the community.

*Keywords: Conflict of Interest, Elite, State, Society*

## PENDAHULUAN

Konflik dalam pembebasan lahan merupakan hal yang biasa terjadi. Konflik terjadi karena persinggungan antaraktor dalam memperebutkan sumber daya atau kepentingan. Terlebih jika proyek pembebasan lahan tersebut bersifat prestisius dan bernilai cukup besar. Aktor saling berkontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan kepentingan. Masing-masing aktor saling berlomba dalam mewujudkan kepentingannya, tanpa memperdulikan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kepentingan kolektif. Dalam konteks ekonomi neoliberal saat ini pembangunan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang terjadi di Kabupaten Gresik dengan adanya pembangunan pelabuhan *internasional Java Integrated Industrial Port Estate*. Pembangunan pelabuhan internasional ini ditujukan untuk meningkatkan ekonomi Gresik dan Jawa Timur, selain itu juga untuk mengurai aktivitas kepadatan yang terjadi di Tanjung Perak Surabaya. Pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri menjadi jawaban untuk menekan biaya logistik sekaligus mencegah monopoli yang terjadi di antara pelabuhan.

Pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik telah dimulai sejak tahun 90-an. Pelabuhan internasional Gresik dibangun di atas lahan seluas 2.500 hektar, yang meliputi konstruksi pembangunan dermaga seluas 85 hektar dengan panjang 500 meter, untuk kawasan pelabuhan seluas 400 hektar dengan panjang dermaga 6.500 meter. Namun baru sekitar 1.500 hektar yang dibebaskan.<sup>1</sup> Sulitnya pembebasan lahan tidak terlepas dari permainan harga oleh para makelar yang memaksa membeli lahan petani tambak dengan harga murah. Penawaran harga yang diberikan di bawah nominal harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, selain itu dalam proses pembayaran lahan seringkali mengalami hambatan. Terhambatnya biaya pelunasan lahan tambak dikarenakan adanya ketidakberesan dalam proyek pembebasan lahan. Faktor-faktor tersebut menjadi pemantik konflik dalam pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik. Hal tersebut menjadi indikasi fenomena kontestasi dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dalam pembebasan ini melibatkan para aktor yang terdiri dari Bupati Sambari sebagai aktor yang mewakili negara. H Syaiful selaku pemegang SPK (surat perintah kerja) pembebasan lahan, dalam hal ini juga diwakili oleh pihak swasta yang terdiri dari PT BKM dan PT BKMS, selaku tender proyek yang membantu proyek pembebasan lahan. Dan masyarakat, yang terdiri dari pemilik lahan dan para nelayan. Keberadaan H. Syaiful sebagai pemegang SPK pembebasan lahan tidak terlepas dari hubungan kedekatan dengan Bupati Sambari. Pembangunan pelabuhan tidak luput dari berbagai pro kontra yang terkait dengan persoalan pembebasan lahan, pertentangan dari masyarakat, rusaknya ekosistem laut, munculnya pergerakan persatuan masyarakat, yang keseluruhan mencerminkan proyek pembangunan pelabuhan internasional. Hal yang menarik dalam pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik adalah kontestasi antaraktor sehingga menimbulkan konflik. Antaraktor saling bersinggungan dan berkontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan kepentingan di masing-masing pihak. Pembangunan pelabuhan internasional Gresik merupakan eksistensi sebagai proyek publik sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Keberadaan para aktor dalam pembebasan lahan mempunyai kaitan erat dengan kepentingan para aktor dalam sektor politik dan ekonomi.

---

<sup>1</sup>Sugiyono, Proyek Pelabuhan Internasional di Gresik Terkendala Lahan[berita online]. Surabaya.tribunnews.com, 16 September 2014 pukul 18:52, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015, pukul 09:25 WIB; tersedia dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/09/16/proyek-pelabuhan-internasional-di-gresik-terkendala-lahan>; internet.

Keterlibatan negara dan masyarakat dalam pembebasan lahan menjadi menarik, mereka menjadi mitra sekaligus penolak kebijakan pemerintah. Dalam pendekatan ekonomi politik penekanan pada aspek tertentu dimana kekuasaan – kekuasaan politik berkontestasi. Pendekatan ini menunjukkan cara – cara untuk mencapai tujuan dalam mengatur kepentingan dengan konsekuensi dalam berbagai wacana yang tidak terlacak di area publik. Pendekatan ini merupakan pendekatan analitis yang menjelaskan relasi pembangunan ekonomi, negara dan masyarakat. Pemerintah mempunyai tujuan tertentu, pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan namun, pemerintah juga memikirkan berbagai persoalan yang ada. Masyarakat dengan beragam pro kontra terhadap kebijakan pemerintah dengan kebebasannya bukan hanya sebagai subjek kekuasaan, melainkan berperan sebagai operator kekuasaan. Kekuasaan negara merupakan bentuk kebebasan yang terkontrol yang di dalamnya melibatkan peran masyarakat untuk menjalankan kekuasaan secara bersama–sama.

### **Penyebab Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik**

Konflik yang terjadi dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik disebabkan oleh konflik vertikal kepentingan antaraktor. Konflik tumbuh karena adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing aktor. Masing-masing aktor saling mewujudkan kepentingannya dan berupaya untuk mendapatkan atau mempertahankan sumber-sumber yang ada. Terlebih dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional *Java Integrated Industrial Port and Estate* Gresik merupakan proyek besar dengan nilai ekonomi yang prestisius, sehingga memungkinkan para aktor untuk ikut terlibat dalam proyek pembebasan lahan.

Dalam pembebasan lahan konflik merupakan hal yang biasa terjadi. Konflik tumbuh karena adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing aktor. Konflik selalu terkait dengan tujuan untuk mempertahankan sumber-sumber yang selama ini sudah dimiliki, merupakan kecenderungan hidup manusia. Manusia ingin memelihara sumber-sumber yang menjadi miliknya, dan berupaya mempertahankan dari usaha pihak lain untuk merebut atau mengurangi sumber-sumber tersebut.<sup>2</sup> Dalam pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik konflik antaraktor terjadi karena masing-masing aktor saling berupaya untuk mendapatkan sumber yang ada dengan segala cara tanpa memperdulikan cara yang digunakan. Mereka berupaya mendapatkan keuntungan secara maksimal dengan mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat.

Polemik konflik vertikal yang terjadi dalam pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik dipicu pada saat pemilihan kepala daerah serempak 2015. Karena untuk membiayai proses pemilihan kepala daerah, Bupati Gresik melakukan sejumlah proyek pembebasan lahan yang di dalamnya terdapat ketidakberesan, sehingga memantik konflik dengan sejumlah aktor, terutama masyarakat pemilik lahan. Masyarakat merasa dirugikan karena lahan mereka diambil secara sepihak dan masyarakat tidak dapat berbuat banyak, selain mengadakan peristiwa tersebut kepada LIRA.

Selain konflik yang terjadi antaraktor pembebasan lahan dengan masyarakat pemilik lahan, juga terdapat kolaborasi yang terjadi antara pemerintah dan aktor swasta, yakni dengan H. Syaiful. Kolaborasi ini terjadi karena keduanya merupakan mitra yang mempunyai hubungan simbiosis yang saling menguntungkan. H. Syaiful sebagai orang dekat bupati mempunyai peranan penting dalam proyek pembebasan lahan dan pemilihan Bupati. Dalam proyek pembebasan lahan H. Syaiful berperan sebagai aktor swasta yang

---

<sup>2</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 198.

menguasai tender pembebasan lahan. Penguasaan tender selain dilakukan atas kerja sama dengan bupati untuk membiayai pemilukada serempak 2015 juga dilakukan untuk memperkaya diri. Selain itu dalam pemilukada H. Syaiful juga berperan sebagai tim sukses Bupati Sambari.

Kedua Aktor telah bermitra cukup lama, sebelum proyek pembangunan pelabuhan internasional Gresik berdiri keduanya terlibat dalam hubungan *patron clien*. Keputusan politik dibuat atas dasar jaringan pribadi. Hubungan antara pemerintah dan sektor swasta atau pengusaha bersifat simbiosis yang mengarah pada fenomena patronase. Pemegang kekuasaan dipandang suatu kesatuan nyata dan kegiatan politik menggantung dalam bentuk jaringan vertikal yang saling bersaing untuk mendapatkan perlindungan dari pemegang kekuasaan (*patron*). Hubungan *patron clien*, elite mempertahankan kepentingan politik dan jaringan yang terbentuk akan utuh apabila patron memberikan peluang politik dan ekonomi bagi *clien* yang melingkupinya. Dalam hubungan ini persaingan antar elite merupakan relasi untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Segala bentuk keputusan politik dan ekonomi atau konflik-konflik yang terjadi dipahami sebagai *output* dari persaingan atau kontestasi.

Ketidakberesan dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik dilakukan untuk membiayai pencalonan Bupati Sambari, agar dapat memenangkan pemilihan dengan membeli suara masyarakat Gresik. Pembiayaan ini dilakukan dengan mengambil keuntungan secara sepihak dari proses jual beli lahan tambak masyarakat yang digunakan untuk pembangunan pelabuhan internasional Gresik. Ketidakberesan yang terjadi dalam pembebasan lahan di antaranya dengan melakukan pencaplokan lahan masyarakat dengan menerbitkan petok D palsu, yang diperoleh melalui kerja sama antara Bupati dengan kepala desa serta para notaris tanah. Kolaborasi yang dilakukan para aktor ditujukan untuk mempermudah penerbitan petok D dan juga transaksi jual beli lahan.

Petok D yang diterbitkan di dalamnya terdapat keterangan palsu dengan memuat mutasi kasih kepada pemilik lahan yang baru, padahal pemilik lahan yang sesungguhnya dengan pemilik palsu tidak mempunyai hubungan kekerabatan apapun dan keduanya tidak saling kenal. Pemilik lahan yang mengalami kerugian karena lahannya telah dijual secara sepihak tidak dapat berbuat apapun karena yang mereka hadapi merupakan kalangan elite dengan dominasi kekuasaan dan kekuatan sumber yang dimiliki. Masyarakat dan petani hanya bisa menuntut keadilan dengan melaporkan kasus yang mereka hadapi kepada tim investigasi Lira (Lumbung informasi rakyat) yang dibuat untuk menyelidiki kasus ketidakberesan dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik.

Berbagai bentuk ketidakberesan dalam pembebasan lahan merupakan indikasi kuat dari lemahnya peranan pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Dalam realitas sosial yang ada pemerintah dianggap gagal karena tidak mampu menyediakan fasilitas dasar sehingga perlu mengadakan kerja sama atau swastanisasi dalam pembangunan pelabuhan internasional Gresik. Pemerintah hanya mampu membayar untuk itu pembebasan lahan diserahkan kepada pihak swasta yang pada umumnya tidak mempunyai dana yang cukup untuk membebaskan lahan. Hal ini dapat dilihat dari proyek pembebasan lahan yang diberikan kepada pihak swasta yakni PT BKM dan PT BKMS.

Selain pencaplokan lahan masyarakat, ketidakberesan juga terjadi dalam tukar guling tanah kas desa yang menyalahi peraturan. Terdapat empat tanah kas desa (TKD) yang dibebaskan tanpa melalui prosedur yang seharusnya. Dalam pembebasan ini melibatkan oknum pemerintah desa terkait. Hal ini tidak dibenarkan karena menyalahi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 terutama yang tercantum dalam pasal 15 ayat 1. Dimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tanah kas desa

seharusnya dijual melalui kesepakatan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sedangkan untuk ganti rugi tanah harus berada di daerah setempat, bukan di luar desa. Dalam pembebasan ini menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan permendagri seperti ganti rugi tanah kas desa yang berada di luar desa dengan kecamatan yang berbeda. Selain itu TKD yang dibebaskan tidak melalui kesepakatan dengan masyarakat desa, TKD dibebaskan secara sepihak dengan hanya melibatkan oknum pemerintahan desa, notaris, dan para aktor elite. Hal ini jelas menyalahi aturan dan merugikan masyarakat desa setempat, namun persoalan ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, karena dilakukan dengan sangat rapi.

Penyalahgunaan tanah kas desa selain digunakan untuk membiayai pemilukada, juga digunakan untuk memperkaya diri masing-masing aktor. Mereka tidak memperdulikan cara-cara yang digunakan meskipun harus mengorbankan hak dan kepentingan masyarakat. Karena kekuasaan dari kelompok elite telah mendominasi, masyarakat tidak mampu berbuat banyak karena terkendala dengan sumber dan kekuatan yang kurang mendukung. Tanah kas desa dijual secara sepihak untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melakukan kesepakatan atau perundingan dengan masyarakat desa setempat, sehingga menyalahi aturan dan merugikan desa serta masyarakat.

Konflik dalam pembebasan lahan juga terjadi karena dampak lingkungan yang banyak merugikan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan di antaranya penyempitan kali akibat proyek pengurukan yang berakibat mengganggu Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) dan juga alur perahu nelayan. Nelayan banyak yang mengeluhkan tentang pengurukan kali, selain alur pencarian ikan yang semakin jauh juga dikarenakan hasil tangkapan ikan yang menurun. Nelayan merasa dirugikan karena mata pancaharian mereka berangsur-angsur menghilang, sedangkan mereka harus terus berjuang untuk menghidupi keluarga mereka. Selain nelayan, masyarakat lain yang dirugikan adalah para pemilik tambak. Mereka mengalami kesulitan dalam mengairi tambak karena kali yang biasanya digunakan untuk mengairi di uruk, sehingga petani tambak kesulitan untuk mendapatkan air.

Berbagai ketidakberesan yang terjadi dalam pembebasan lahan merupakan indikasi dari konflik yang di dalamnya terdapat kolaborasi dan kontestasi dari para aktor yang terlibat di dalamnya. Ketika beberapa orang dengan kepentingan laten yang sama saling bertemu, maka kepentingan laten tersebut muncul dalam kesadaran. Aspirasi yang sama tersebut menjadi norma kelompok, dan kepemilikan aspirasi tersebut menjadi manifestasi kesetiaan terhadap kelompok sehingga memunculkan *struggle group*. Menurut Dahrendorf ada tiga kondisi yang mendukung kemunculan *struggle group*, yang mendorong terjadinya konflik yaitu, Pertama komunikasi terus-menerus di antara orang-orang senasib. Kedua adanya seorang pemimpin yang membantu mengartikulasikan ideologi, mengorganisasikan kelompok, dan memformulasikan rencana untuk melakukan tindakan kelompok. Ketiga, legitimasi kelompok di mata komunitas yang lebih luas atau setidaknya tidak ada tekanan komunitas yang efektif terhadap kelompok.<sup>3</sup>

Karena banyaknya kerugian yang dialami para pemilik lahan tambak, para pemilik tambak kemudian mendirikan persatuan Ukhpertam (ukhuwah petani tambak Manyar) yang digunakan untuk mempermudah mobilisasi massa dalam menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan aktor pembebasan lahan. Organisasi ini merupakan persatuan para pemilik tambak di daerah Manyar, yang mengorganisasikan diri untuk memperjuangkan hak-hak para petani tambak untuk diperlakukan secara layak, terlebih

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 34.

dalam pembebasan lahan agar segera melunasi pembayaran jual beli tambak masyarakat dan untuk mencapai kesepakatan harga yang sesuai dengan tuntutan para pemilik tambak.

Selain Ukhpertam masyarakat juga mendirikan persatuan BOMB (Barisan Orang Manyar Bersatu) persatuan ini merupakan gabungan dari orang-orang Manyar yang dikomandoi oleh Entis Sutisna. Mereka bersatu untuk mengumpulkan aksi massa guna memprotes pembangunan pelabuhan, karena pembangunan tidak memberikan keuntungan, namun justru banyak merugikan masyarakat dengan beragam dampak yang dihasilkan, terlebih dampak kerusakan lingkungan. Pembangunan pelabuhan dianggap melanggar aturan perundang-undangan dan Amdal karena pembangunan justru banyak merusak ekosistem laut dan rusaknya hutan bakau di sekitar kali akibat proyek reklamasi.

Kemunculan kelompok pejuang dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan interasional Gresik, merupakan indikasi bahwa komunikasi yang terjadi secara terus-menerus di antara orang-orang yang senasib menjadikan keterikatan di antara mereka semakin kuat, sehingga membentuk kelompok yang mempersatukan kepentingan dan asirasi mereka. Dengan adanya suatu kelompok mereka dapat dengan mudah melakukan interaksi dan saling bertukar aspirasi, sehingga memudahkan untuk menyampaikan tuntutan. Adanya pemimpin dalam kelompok menjadikan mereka lebih kuat karena saling bersatu dan lebih siap dalam menghadapi tekanan.

### **Eskalasi Konflik Pembebasan Lahan Pelabuhan Internasional Gresik**

Jika dilihat dari sudut teori, eskalasi konflik pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik dapat dijelaskan melalui model eskalasi agresor-defender dengan menarik garis pembeda di antara kedua pihak yang berkonflik. Salah satu pihak "agresor" (penyerang), dianggap memiliki suatu tujuan atau sejumlah tujuan yang mengakibatkan terlibat di dalam konflik bersama pihak lainnya, "defender" (pihak bertahan).<sup>4</sup> Pihak agresor adalah para aktor pembebasan lahan yang terdiri dari H. Syaiful CS, PT BKM, dan PT BKMS, sedangkan pihak defender adalah para pemilik lahan dan masyarakat. tindakan yang dilakukan para aktor pembebasan lahan dengan membebaskan lahan secara sepihak dan dengan penawaran harga yang tidak disepakati masyarakat menjadikan masyarakat menolak menjual lahan sampai aksi mereka dipenuhi.

Perbedaan kepentingan selalu terkait dengan pro-kontra yang bertransformasi dan terus-menerus terintensifikasi sehingga konflik semakin sulit di atasi. Konflik tidak mudah bereskalasi jika hubungan yang ada memiliki stabilitas tinggi di antara kedua belah pihak. Eskalasi konflik mungkin terjadi bila masing-masing aktor beranggapan mempunyai kekuatan untuk mengubah aspirasi pihak lain secara substansial. Kekuatan yang dimiliki dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah. Seperti yang terjadi dalam pembebasan lahan, masing-masing aktor mempunyai kekuatan yang diunggulkan, aktor elite dengan kekuasaan dan kekuatan sumber daya yang dimiliki, sedangkan masyarakat kekuatan yang diunggulkan adalah kekuatan massa.

Transformasi biasa terjadi selama proses eskalasi. Seperti halnya konflik pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik, pada mulanya konflik ini sebatas permasalahan yang menunjukkan kesenjangan kekuasaan dan kekuatan ekonomi, namun seiring berjalannya waktu karena proses integrasi yang terjadi secara terus-menerus konflik bertransformasi selama proses eskalasi. Transformasi yang terjadi dalam pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik dapat ditransformasikan ke dalam kecil menuju besar. Ketika konflik mengalami intensitas secara terus-menerus konflik akan bereskalasi, sehingga ada kecenderungan bahwa isu-isu yang ada mengalami poliferasi.

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 200.

Kecenderungan pada masing-masing pihak menjadi semakin terserap di dalam konflik yang terjadi dan bersedia mengarahkan sumber daya sebarang guna memenangkannya.<sup>5</sup>

Kecenderungan ini terdapat pada konflik pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik. Masyarakat pada mulanya bersikap mendukung terhadap proyek pembangunan pelabuhan dengan harapan memberikan peluang lapangan kerja dan peningkatan ekonomi, namun segera berganti menjadi pertentangan dan konflik setelah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan banyak merugikan masyarakat. Selain itu tuntutan dari masyarakat untuk menghentikan proyek pelabuhan dan aksi massa yang dilakukan masyarakat mendorong konflik semakin dalam. Akibatnya masyarakat membentuk aksi massa yang menggalang persatuan dengan menuntut dan mengancam proyek pelabuhan untuk segera dihentikan dan memenuhi tuntutan masyarakat yang diwujudkan dalam aksi demonstrasi. Dalam aksi tersebut menimbulkan "efek demonstrasi" yang seringkali mendasari kekerasan politis. Mereka cenderung mengidentifikasi diri dengan para anggota kelompok lain yang berdekatan, yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan kelompoknya sendiri.<sup>6</sup>

Di pihak elite isu-isu terkait dengan ketidak beresan dalam pembebasan lahan semakin menjadi bahan persinggungan antar aktor untuk saling berkolaborasi dalam mewujudkan kepentingan dari masing-masing aktor yang terlibat dalam hubungan *patron-clien*. Mereka semakin gencar mencari peluang untuk melancarkan setiap aksi dan kepentingan mereka demi meraih keuntungan yang maksimal dengan tanpa memperdulikan hak-hak masyarakat. mereka merasa berkuasa karena praktik perburuan rente yang dilakukan tanpa pertanggung jawaban.

Eskalasi sumber daya yang terjadi diantara kedua belah pihak saling bersikukuh untuk tetap mempertahankan kepentingan masing-masing aktor dengan mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki. Di pihak masyarakat dengan mengerahkan kekuatan massa yang tergabung dalam persatuan yang saling beraliansi karena persamaan kepentingan dan perasaan yang senasib, sedangkan di pihak elite mereka mengerahkan kekuasaan dan kekuatan ekonomi yang dimiliki.

Konflik pembebasan lahan menggambarkan kedua belah pihak berada dalam kondisi krisis. Pada mulanya masyarakat berjuang secara individu untuk memperjuangkan setiap tuntutan dan kepentingan yang mereka harapkan, namun seiring dengan perkembangan isu-isu seputar pembebasan lahan dan pembangunan pelabuhan internasional masyarakat mulai bekerja secara kolektif dengan membentuk persatuan massa yang berorientasi untuk membangun kekuatan massa agar dapat memenuhi semua tuntutan dan kepentingan yang diperjuangkan. Dengan melakukan berbagai macam cara untuk membentuk barisan massa yang bersatu dan berjuang bersama. Sedangkan di pihak elite mereka terus berkolaborasi membentuk kelompok-kelompok artikulasi yang dapat mendongkrak regulasi kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak mereka dengan dukungan kekuasaan dan kekuatan sumber daya.

Konflik juga diperlukan untuk mendapatkan keadilan. Banyak cara yang bisa digunakan oleh para kelompok elite atau kelompok penguasa untuk mencegah agitasi dan meredam ketidak puasan. Situasi yang tampak tenang hanyalah aliansi yang digunakan untuk menutupi ketidak beresan setiap perlakuan mereka. Konflik banyak menyita waktu dan energi, begitu banyak kontroversi tentang pro-kontra yang terjadi, terlebih jika tuntutan tidak dapat dipenuhi. Pertentangan yang ada tidak selalu berdampak negatif, adakalanya berubah menjadi wujud solidaritas persatuan atas kepentingan yang sama.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 144.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 32.

Pada konflik pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik, polarisasi yang terbentuk dalam kelompok di atasi dengan terbentuknya kelompok pejuang atau *struggle group*, terbentuknya kelompok ini di latar belakang oleh kesamaan nasib di antara masing-masing aktor. Dengan menciptakan pertalian dan persatuan.

### **Kolaborasi Kepentingan Aktor Elite dalam Pembebasan Lahan**

Masyarakat sebagai pemilik lahan dihadapkan pada kepentingan pembebasan lahan yang digunakan dalam pembangunan pelabuhan internasional Gresik. Di dalamnya terdapat berbagai relasi kepentingan yang dilakukan antaraktor elite yang saling berkolaborasi dalam praktik perburuan rente dengan tujuan untuk memperkaya diri. Mereka melakukan segala cara dalam mewujudkan kepentingannya, dengan mengorbankan hak masyarakat. Masyarakat banyak yang dirugikan, selain kehilangan tanah mereka juga kehilangan mata pancaharian mereka. Karena merasa dirugikan, masyarakat bersatu untuk menuntut hak mereka dan menolak pembebasan lahan, sehingga memicu terjadinya konflik. Konflik antara masyarakat dengan aktor pembebasan lahan merupakan konflik vertikal dengan polarisasi kekayaan dan kekuasaan, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial.

Kolaborasi ini dilakukan oleh pemerintah dengan elite swasta pembebasan lahan. Elite pemerintah meliputi Bupati Gresik dengan kepala desa di tiga desa, yakni kepala desa Manyarsidorukun, kepala desa Manyarsidomukti, dan kepala desa Manyarejo. Mereka berkolaborasi untuk memudahkan setiap proses pembebasan lahan. Setiap keberhasilan pembebasan lahan masing-masing pihak akan mendapatkan komisi yang masuk ke dalam kantong pribadi mereka. Praktik perburuan rente ini berjalan dengan cukup rapi hingga tidak banyak diketahui masyarakat. Selain kolaborasi dengan sesama pemerintahan, kolaborasi dalam memaksimalkan keuntungan juga dilakukan oleh Bupati dengan pihak swasta yakni H. Syaiful. Kolaborasi antara Bupati Gresik dan H. Syaiful merupakan relasi kepentingan di antara para elite.

Dalam kolaborasi keterlibatan Bupati dengan H. Syaiful merupakan relasi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Mereka menjadi aktor utama sekaligus kelas yang keberadaannya difasilitasi oleh negara. Hal ini dapat dilihat dari akses kemudahan untuk memenangkan tender pembebasan lahan dari Bupati Gresik kepada H. Syaiful. Terlebih H. Syaiful merupakan orang dekat Bupati, yang mempunyai kontribusi dalam membantu kemenangan dalam pemilukada serempak tahun 2015.

Konflik pembebasan lahan pelabuhan internasional Gresik terjadi akibat kepentingan ekonomi yang dilakukan oleh para aktor untuk mendapatkan keuntungan. Relasi yang terbentuk mengarah pada kontestasi atau kolaborasi terhadap kepentingan yang berbeda-beda. Terjadinya kontestasi dan kolaborasi antara kekuatan ekonomi dan politik dalam suatu pembangunan merupakan hal yang wajar. Untuk merealisasikan kepentingan-kepentingan tersebut hak masyarakat seringkali dikorbankan, sehingga memicu konflik. Konflik yang terjadi merupakan polarisasi vertikal yang berasal dari kekuasaan dan kekuatan kepemilikan sumber-sumber.

Tujuan pembebasan yang diperuntukkan sebagai proyek perburuan rente dan memperkaya diri, harusnya tidak terjadi karena hal ini memberikan kerugian dan kesengsaraan bagi masyarakat. Mereka harus kehilangan tanah dan mendapatkan ketidakadilan dengan kehilangan sumber kehidupan. Pemerintah sebagai pemilik proyek harusnya bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan ketidakberesan yang terjadi, sehingga pembangunan dapat tetap berjalan dan masyarakat tetap sejahtera tanpa harus kehilangan hak-hak mereka.

Pembebasan yang dilakukan H. Syaiful CS, terindikasi dilakukan untuk mengeruk keuntungan dari proyek pembebasan lahan. Hal ini dilakukan karena H. Syaiful merupakan mitra sekaligus orang dekat Bupati Gresik. pemberian SPK pembebasan lahan kepada H. Syaiful merupakan salah satu kolaborasi dengan Bupati Sambari untuk memudahkan penguasaan proyek pembebasan, yang di dasarkan pada kepentingan dan hubungan sebagai mitra. Proyek pembebasan lahan rentan terhadap konflik karena menjadi incaran banyak aktor untuk mewujudkan kepentingannya, dan di dukung dengan ketersediaan sumber yang melimpah.

Relasi kuasa yang terjadi antara pengusaha dengan pemerintah menunjukkan kuasa dominasi. Masyarakat tidak dapat berbuat banyak, karena kekuatan yang dihadapi cukup besar. relasi antara pemerintah dan pengusaha dalam pembebasan lahan merupakan kuasa nyata. Posisi masyarakat yang lemah berakibat pada lemahnya kekuatan tawar-menawar dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah merupakan aktor dominan yang dapat mensubordinasi semua kekuatan, termasuk kekuatan pasar. Dalam pembebasan lahan pembangunan pelabuhan internasional Gresik keberadaan negara, pasar, dan masyarakat saling berhubungan. Negara sebagai penyedia layanan kebijakan bagi masyarakat dengan otonomi relatifnya memberikan keterbukaan bagi sektor industri yang akan menanamkan modalnya dalam proyek pembangunan pelabuhan internasional Gresik. masyarakat dengan haknya untuk memperoleh pekerjaan dan kesejahteraan dalam pembangunan.

Dengan demikian pembangunan merupakan salah satu akses dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat dengan meningkatkan ekonomi. namun, pembangunan juga rentan akan konflik terlebih di dalamnya terdapat berbagai relasi kepentingan yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Pembangunan pelabuhan internasional Gresik merupakan keputusan politik yang di ambil oleh pemerintah, namun di dalamnya menjadi semakin beragam setelah keputusan tersebut melibatkan banyak aktor di dalamnya yang tidak rentan terhadap konflik dan kontestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminah, Siti. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008
- Dahrendorf, Ralf. *Konflik dan Konflik dalam Masyarakat Industri, Sebuah Analisa Kritis*. Terjemahan dari bahasa asing. Buku terbitan dari Jerman. 1955.
- Deliarnov. *Ekonomi Politik: Mencangkup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif*. Jakarta: Erlangga. 2006
- Fakih, M. *Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press. 2001
- Fukuyama, Francis. *The End of History and The Last Man*. Yogyakarta: Qalam. 2003
- George, Ritzer dan Douglas J. Goodman. *Teori Marxis dan berbagai Ragam Teori Neo-Marxian*. Bantul: Kreasi Wacana. 2001
- Harison, Lisa. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007
- Miall, H. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama, dan Ras*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001
- Pruitt, G. Dean dan Rubin, Z. Jeffrey. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004

- Poulantzas, Nicos. *Marxist Theory and Political Strategy*. Macmillan. 1985
- Poulantzas, Nicos. *Political Power and Social Classes*, London: New Left Books. 1969
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007
- Sudibyo, Agus. *Ekonomi Politik Media Penyiaran*. Jakarta: LKIS. 2004
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 1992

### Jurnal

- Basri, A. Said Hasan. "Analisis Konflik Pembebasan Tanah dan Resolusinya di Balik Mega Proyek Jembatan Suramadu." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan*. 2 (1) Juni 2013: 26-35.

### Undang-undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

### Internet

- Gresikonline. *Pembangunan Pelabuhan Internasional Gresik Senilai 10 T Akan Segera Dibangun*[berita online]. Gresik.com, 28 Desember 2012, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 pukul 08:16 WIB; tersedia dari <http://gresik.co/gresik/ekonomi/pelabuhan-internasional-gresik-senilai-10-t-akan-segera-dibangun>; internet.
- Gresikonline. *Warga Demo Proyek Pelabuhan*[berita online]. Duta.com, 20 Mei 2015, diakses pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 09:50 WIB; tersedia dari <http://duta.co/blog/2015/05/20/warga-demo-proyek-pelabuhan/>; internet.
- Kominfo. *Komisi D Sidak Pelabuhan JIPE Manyar Gresik* [berita online]. Surabaya, 21 Maret 2016, di akses pada tanggal 25 Mei 2016 pada pukul 09.29 WIB: tersedia dari [kominfo.jatimprov.go.id](http://kominfo.jatimprov.go.id); Internet.
- Liraonline. *Diduga Kumpulan Dana 750 Milyar dari Hasil Serobot Tanah Warga untuk Pemenangan Sambari*[berita online]. Liranews.com, 1 September 2015. diakses pada tanggal 17 Oktober 2015, pukul 08.58 WIB, tersedia dari <http://liranews.com/berita-utama/kumpulan-dana-±750milyar-dari-hasil-serobot-tanah-warga-diduga-untuk-pemenangan-sambari>; internet.
- Sugiyono. *Proyek Pelabuhan Internasional di Gresik Terkendala Lahan*[berita online]. Surabaya.tribunnews.com, 16 September 2014, diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 pukul 09:25 WIB; tersedia dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/09/16/proyek-pelabuhan-internasional-di-gresik-terkendala-lahan>; internet.
- Sugiyono. *Alur Perahu Terganggu, Nelayan Gresik Demo Proyek Pelabuhan Internasional*[berita online]. Surabaya.tribunnews.com, 20 Mei 2014, diakses pada tanggal 14 Maret 2016, pukul 09:51 WIB, tersedia dari <http://surabaya.tribunnews.com/2014/05/20/alur-perahu-terganggu-nelayan-gresik-demo-proyek-pelabuhan-internasional>; internet.